

DAFTAR PUSTAKA

A. KITAB SUCI

Al-Quran dan Terjemahnya.

B. BUKU

- Adjie, Habib. 2008. *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris)*. Bandung: Refika Aditama.
- Adjie, Habib. 2013. *Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Amiruddin dan H. Zainal Asikin. 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Anshori, Abdul Ghofur. 2009. *Lembaga Kenotariatan Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.
- Asikin, Zainal. 2002. *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.
- Black, Henry Campbell. 2014. *Black's Law Dictionary*. 10th edition. Boston: Thomson West Publishing.Co.
- Darmodihardjo, Darji. 2011. *Filsafat Hukum: Edisi lengkap (Dari Klasik sampai Postmoderenisme)*. (dalam Hyronimus Rhiti). Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Effendi, Lutfi dan Sri Kustina. 2000. *Hukum Administrasi (Administrasi Recht)*. Malang: Biro Konsultan dan Bantuan Hukum.
- Erwin, Muh. 2011. *Filsafat Hukum: Refleksi Kritis Terhadap Hukum*. Jakarta: Rajawali Press.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Friedman. 1990. *Teori dan Filsafat Hukum: Idealisme Filosofis dan Problema Keadilan*. (Diterjemahkan dari buku aslinya Legal Theory oleh Muhamad

- Arifin, Disunting oleh Achmad Nasir Budiman dan Suleman Saqib). Jakarta: Rajawali.
- Fuady, Munir. 2013. *Hukum Jaminan Utang*. Jakarta: Erlangga.
- H.R., Ridwan. 2006. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Hadjon, Philipus M. 1997. *Tentang Wewenang*. Jakarta: Universitas Airlangga.
- Hadjon, Philipus M. 2002. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada.
- Harahap, M. Yahya. 2005. *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hartini, Rahayu. 2008. *Hukum Kepailitan*. Malang: UMM Press.
- Hartono, Siti Soemarti. 1993. *Seri Hukum Dagang, Pengantar Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
- Hoff, Jerry. 2000. *Undang Undang Kepailitan Indonesia*. Penerjemah Kartini Mulyadi. Jakarta: P.T. Tatanusa.
- HS, Salim. 2015. *Teknik Pembuatan Suatu Akta (konsep Teoritis, Kewenangan Notaris Bentuk dan Minuta Akta)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Lontoh, Rudhy A. 2001. *Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Bandung: Alumni.
- Lubis, Suhrawardi K. 2006. *Etika Profesi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mertokusumo, Sudikno. 2006. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Mertokusumo, Sudikno. 2007. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Nating, Imran. 2004. *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Notohamidjojo, O. 2011. *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*. Salatiga: Griya Media.
- Prodjodikiro, R. Wirjono. 2000. *Perbuatan Melanggar Hukum dipandang dari sudut Hukum Perdata*. Bandung: Mandar Maju.

- Rasyidi, Lilik dan Ira Thania Rasyidi. 2004. *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti.
- Rasyidi, Lilik. 2010. *Filsafat Hukum*. (dalam Zainuddin Ali). Jakarta: Sinar Grafika.
- Salman, H.R Otje. 2010. *Filsafat Hukum (Perkembangan & Dinamika Masalah)*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Sastrawidjaja, Man S. 2006. *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Bandung: Alumni.
- Shubhan, M. Hadi. 2008. *Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma, dan Praktik Peradilan*. Jakarta: Kencana.
- Sjahdeini, Sutan Remy. 2002. *Hukum Kepailitan*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2007. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Soeroso. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT. Sinar Grafika.
- Sunarmi. 2010. *Prinsip Keseimbangan Dalam Hukum Kepailitan di Indonesia*. Jakarta: PT. Sofmedia.
- Sutantio, Retnowulan. 1996. *Kapita Selekta Hukum Ekonomi Dan Perbankan*. Bandung: Seri Varia Yustisia.
- Syaifurrachman dan Habib Adjie. 2011. *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*. Bandung: Mandar Maju.
- Tambuan, Fred B.G. 2005. *Menelaah Konsep Dasar dan Aspek Hukum Kepailitan*. Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum.
- Tanya, Bernard L., Yoan N Simanjuntak, dan Markus Y. Hage. 2010. *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Tobing, G.H.S. Lumban. 1983. *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Erlangga.
- Usman, Rachmadi. 2004. *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Widjaja, Gunawan. 2004. *Tanggung Jawab Direksi Atas Kepailitan Perseroan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Yani, Achmad dan Gunawan Widjaja. 2004. *Seri Hukum Bisnis, Kepailitan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Yuhassarie, Emmy. 2005. *Undang-undang Kepailitan dan Perkembangannya*. Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum.

C. JURNAL, MAJALAH DAN PENELITIAN ILMIAH

- Firmansyah. 2013. *Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan Dan Pembersan Harta Pailit*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia. Tesis Fakultas Hukum.
- Isfardiyana, Siti Hapsah. 2016. *Sita Umum Kepailitan Mendahului Sita Pidana dalam Pembersan Harta Pailit*. Bandung: Universitas Padjadjaran. Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, Volume 3, Nomor 3.
- Marheni, Lily. 2012. *Kedudukan Benda Jaminan Yang Dibebeani Hak Tanggungan Apabila Terjadi Eksekusi dalam Hal Debitor Pailit Dari Perspektif Hukum Kepailitan*. Depansar: Universitas Udayana. Tesis Program Pasca Sarjana.
- Nurchaya, Indra. 2017. *Peran Notaris Dalam Pembuatan Akta Pencatatan Harta Pailit Dalam Proses Kepailitan Berdasarkan Undang-Undang yang Berlaku*. Jakarta: Universitas Pelita Harapan. Tesis Program Pasca Sarjana.
- Pramono, Dedy. 2015. *Kekuatan Pembuktian Akta yang Dibuat oleh Notaris Selaku Pejabat Umum Menurut Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Jakarta: Universitas Esa Unggul. Lex Jurnalica, Volume 12, Nomor 3, Desember 2015.
- Rahmawati, Rizka. 2019. *Eksekusi Aset Debitor yang Berada Di Luar Negeri dalam Penyelesaian Sengketa Kepailitan*. Maluku: Universitas Pattimura. Jurnal SASI (Jurnal Fakultas Hukum), Volume 25, Nomor 2, Juli-Desember 2019.
- Slamet, Sri Redjeki. 2016. *Perlindungan Hukum Dan Kedudukan Kreditor Separatis Dalam Hal Terjadi Kepailitan Terhadap Debitor*. Jakarta: Universitas Esa Unggul. Jurnal Forum Ilmiah Fakultas Hukum, Volume 13, Nomor 1, Januari 2016.
- Wesna, Made Bagoes Wiranegara, Ngakan Ketut Dunia dan Ida Ayu Sukihana. 2013. *Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pembersan Harta Pailit di Kabupaten Badung*. Denpasar: Universitas Udayana. Jurnal Kertha Semaya (Jurnal Fakultas Hukum), Volume 01, Nomor 03, Mei 2013.
- Widyowati, Intan Ayu. 2017. *Keberadaan Akta Notaris Terkait Proses Pembersan Harta Pailit Berdasarkan Undangundang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Semarang: Universitas Islam Sultan Agung. Tesis Program Pasca Sarjana.
- Wiradharmasa, Ida Bagus Adi dan Ida Ayu Sukihana. 2018. *Perlindungan Hukum Terhadap Kurator dalam Melaksanakan Tugas Pengurusan dan Pembersan*

Harta Debitor Pailit. Denpasar: Universitas Udayana. Jurnal Kertha Semaya (Jurnal Fakultas Hukum) Volume 06, Nomor 04, Agustus 2018.

Yuliza, Syafrina. 2014. *Kewenangan Notaris Dalam Membuat Akta Peralihan Harta Pailit Di Luar Penjualan Lelang*. Surabaya: Universitas Airlangga. Tesis Program Pasca Sarjana.

D. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Republik Indonesia. 1846. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie)*.

Republik Indonesia. 1960. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria*.

Republik Indonesia. 1996. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah*.

Republik Indonesia. 2004. *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*.

Republik Indonesia. 2004. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*.

Republik Indonesia. 2014. *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*.

Republik Indonesia. 2017. *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris*.

Republik Indonesia. 2018. *Putusan Nomor: 13/Pdt.Sus-Pailit/2018/PN.Niaga.Sby*.

Republik Indonesia. 2020. *Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 527 K/Pdt. Sus-Pailit/2020 Jo. Putusan Nomor : 11/Pdt.Sus.G.LainLain/2019/ PN.Niaga.Sby Jo. Putusan Nomor: 13/Pdt.Sus-Pailit/2018/PN.Niaga.Sby*.

Republik Indonesia. 2020. *Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 109/KMA/SK/IV/2020 tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*.

E. LAIN-LAIN

Budisastra. 2009. *Aspek Hukum Dalam Kepailitan*. <http://budisastra.info/home>.

Devita, Irma. 2012. *Perbedaan Akta Autentik dengan Surat Dibawah Tangan*.
<https://irmadevita.com/2012/perbedaan-akta-autentik-dengan-surat-di-bawah-tangan/>.

Hukumkepailitan. 2012. *Kedudukan Kurator Dalam Kepailitan*.
<https://www.hukumkepailitan.com/kurator-dalam-kepailitan/kedudukan-kurator-dalam-kepailitan/>.

Setiawan, Rafdi dan Gabriel Fiorentino Setiadin. 2020. *Strategi Indonesia dalam Membangkitkan Perekonomian Nasional Pasca Covid-19, Sudah Siapkah untuk Bangkit Kembali pada 2021*.
<https://egsa.geo.ugm.ac.id/2020/12/05/strategi-indonesia-dalam-membangkitkan-perekonomian-nasional-pasca-covid-19-sudah-siapkah-untuk-bangkit-kembali-pada-2021>